

# Alur Bisnis Software Dashboard v0.4

Abiyyu Taj Mahasin Bagindo

Meranti Technologies

15 Agustus 2024

## **Daftar Isi**

Pendahuluan .....	4
Fase Pengembangan .....	5
Fase Pertama .....	5
Fase Kedua .....	6
Fase Ketiga .....	6
Fase Keempat .....	7
Bisnis Proses Rekapitulasi Data Dashboard .....	8
Rekapitulasi Data Transaksi di Daerah.....	10
Pengiriman Data Rekapitulasi ke Pusat.....	10
Validasi Data oleh Pusat.....	10
Penyimpanan Data ke Database .....	10
Penampilan Data .....	10
Informasi yang Diperlukan oleh Pemerintah Pusat .....	12
Data Jumlah Kendaraan Bermotor (sesuai data Pemda).....	12
Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tidak Membayar Pajak selama 5 dan 7 Tahun .....	12
Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Tahun Berjalan dan Data Kendaraan Bermotor Baru .....	12
Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tidak Membayar Pajak selama 5, 7, dan 1 Tahun (dalam Rupiah) .....	12
Data Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak secara Online dan Offline, serta Jumlah Pembayaran PKB secara Online dan Offline (dalam Rupiah) .....	13
Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar dan Tidak Membayar Pajak 1, 2, dan 3 Tahun Sebelumnya (sesuai tipe, dalam Rupiah).....	13
Format Data .....	14
Contoh Data .....	15

Penjelasan Kolom-Kolom Data .....	16
Provinsi .....	16
Kabupaten/Kota .....	16
Bulan .....	17
Tahun .....	17
Jenis Kendaraan .....	17
Jumlah Kendaraan.....	18
Jumlah Kendaraan Bayar .....	18
Jumlah Online.....	18
Nominal Online.....	18
Jumlah Offline.....	18
Nilai Offline .....	18
Nominal Kendaraan Tidak Bayar 1 Tahun.....	18
Jumlah Kendaraan Tidak Bayar 5 Tahun.....	18
Nominal Kendaraan Tidak Bayar 5 Tahun.....	19
Jumlah Kendaraan Tidak Bayar 7 Tahun.....	19
Nominal Kendaraan Tidak Bayar 7 Tahun.....	19
Fitur Software .....	20
Visualisasi .....	20
Selisih .....	21
Distribusi .....	22
Detail.....	23
Ringkasan .....	24
Data Provinsi .....	25
Pemekaran.....	26
Kesimpulan .....	27

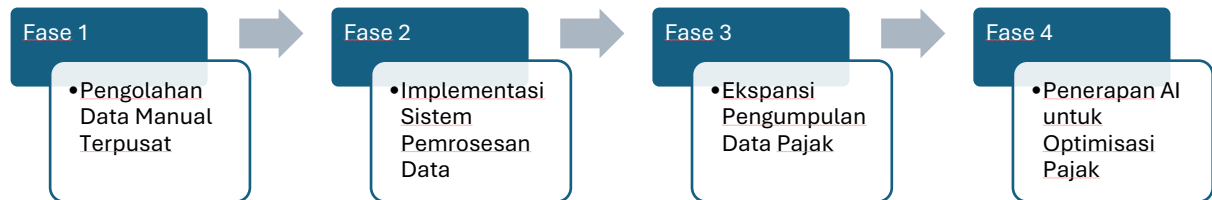
## **Pendahuluan**

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data perpajakan kendaraan bermotor, Pemerintah pusat telah menetapkan pentingnya pengembangan sebuah software dashboard yang terpadu. Software ini dirancang untuk membantu pemerintah pusat dalam memvisualisasikan data perpajakan dari seluruh daerah dalam bentuk bagan-bagan yang mudah dipahami, serta menyediakan akses terhadap data mentah dalam format tabel. Dengan adanya dashboard ini, pemerintah pusat dapat memantau performa daerah secara real-time dan membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat.

Implementasi software dashboard ini juga berperan penting dalam memastikan integritas dan konsistensi data yang diterima dari setiap daerah. Dengan format data yang telah distandarisasi dan pengiriman data yang terjadwal setiap bulan, pemerintah pusat dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan dan memastikan bahwa data yang digunakan adalah valid dan dapat diandalkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja daerah secara keseluruhan.

Dokumen ini akan menjelaskan alur bisnis implementasi software dashboard ini di pemerintah pusat, termasuk bagaimana data akan dikumpulkan, diproses, dan disajikan untuk mendukung tugas-tugas Depdagri dalam pengawasan dan pelaporan perpajakan kendaraan bermotor.

## Fase Pengembangan

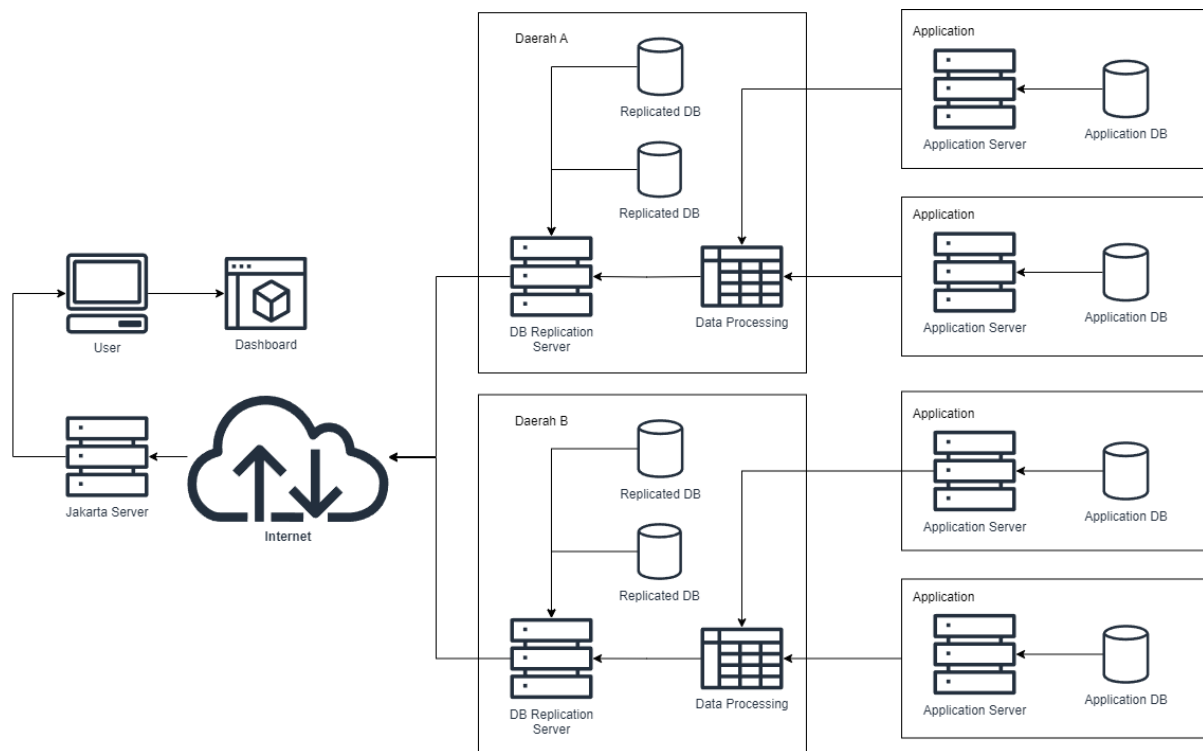


Software ini dirancang untuk berkembang secara bertahap melalui beberapa fase yang telah direncanakan dengan tujuan akhir menciptakan sebuah platform yang komprehensif dan efisien. Berikut adalah tahapan pengembangan yang telah ditetapkan:

### **Fase Pertama**

Saat ini, pengembangan software berada dalam fase pertama, yang fokus utamanya adalah penyelesaian deployment pada server pemerintah pusat. Pada tahap ini, fungsi utama yang diimplementasikan adalah pelaporan data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tingkat kabupaten dengan periode bulanan. Karena prioritas fase ini adalah peluncuran ke environment production, modul-modul pendukung seperti modul admin dan data processing belum tersedia. Oleh karena itu, data dari daerah akan diminta sesuai dengan format yang ditentukan dan harus diinput secara manual oleh pemerintah pusat.

## Fase Kedua



Fase kedua merupakan pematangan dari fase pertama. Pada tahap ini, modul-modul pendukung akan dikembangkan untuk mempermudah alur kerja antara pemerintah pusat dan daerah, serta membangun topologi jaringan yang lebih matang. Modul-modul ini mencakup modul admin untuk monitoring lalu lintas data, modul penerima data yang memfasilitasi pengiriman data dari daerah dengan lebih mudah dan nyaman, serta modul data processing. Fokus utama fase ini adalah memperkuat alur kerja secara keseluruhan dan mengurangi beban kerja di pusat dan daerah, dengan penekanan pada pengembangan dan penyempurnaan sistem keamanan data. Diagram diatas adalah topologi yang telah dirancang untuk mengakomodir alur data yang aman dan lancar.

## Fase Ketiga

Fase ketiga adalah fase ekspansi. Pada tahap ini, cakupan laporan perpajakan akan diperluas, tidak hanya terbatas pada PKB tradisional, tetapi juga mencakup jenis-jenis pajak lain seperti Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Software dashboard akan dikembangkan lebih lanjut untuk dapat menampilkan dan melaporkan data dari berbagai jenis pajak ini kepada pengguna dengan fitur-fitur baru yang relevan.

## **Fase Keempat**

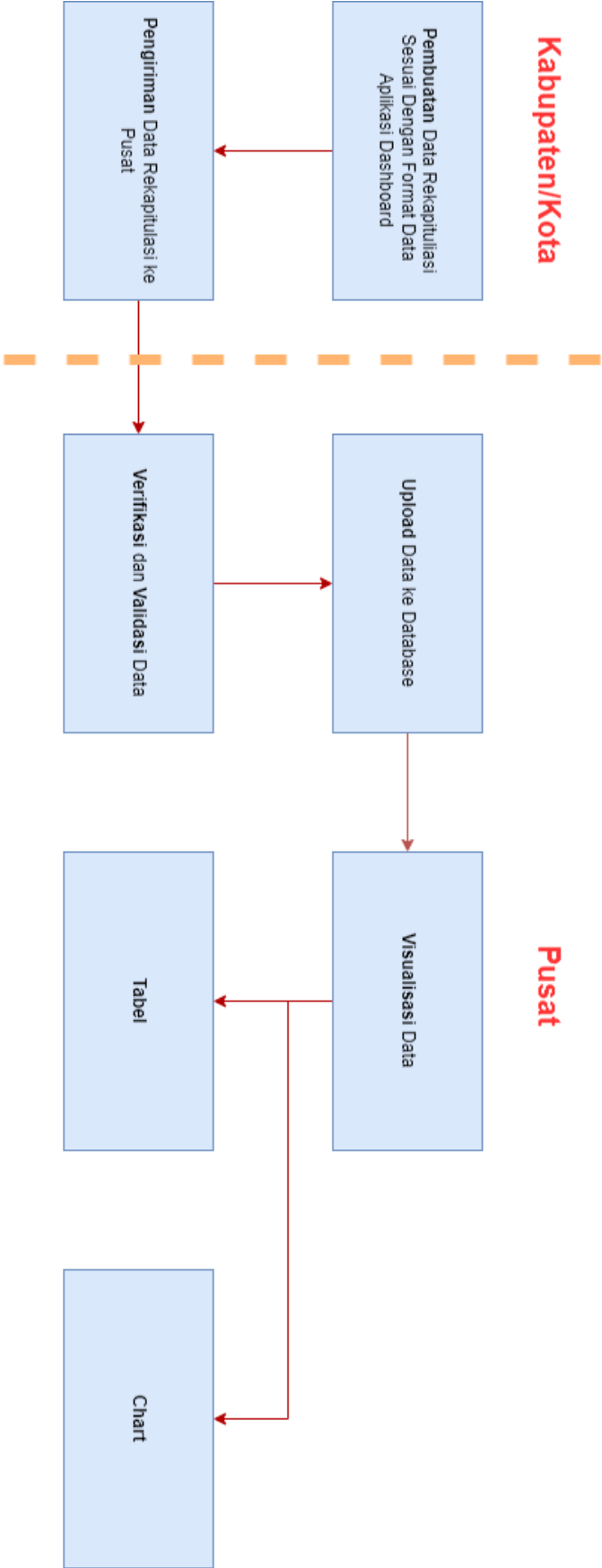
Fase keempat merupakan fase pertumbuhan. Setelah keberhasilan implementasi ketiga fase sebelumnya, pemerintah pusat akan memiliki basis data yang sangat besar dan terperinci. Pada fase ini, fitur-fitur baru akan ditambahkan ke dalam sistem, tidak hanya terbatas pada dashboard. Peningkatan seperti analisis data menggunakan AI akan diperkenalkan untuk menghasilkan laporan yang lebih cerdas dan memberikan wawasan yang lebih dalam bagi pengguna.

## **Bisnis Proses Rekapitulasi Data Dashboard**

Pengumpulan data dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan proses yang krusial untuk memastikan informasi yang tersedia di tingkat nasional akurat dan up-to-date. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari rekapitulasi data di daerah hingga penyajian data dalam software dashboard. Berikut adalah tahapan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendukung pengoperasian software ini:



**BISNIS PROSES REKAPITULASI DATA DASHBOARD**



## **Rekapitulasi Data Transaksi di Daerah**

Tahap pertama dimulai dengan rekapitulasi data transaksi PKB di setiap daerah. Setiap pemerintah daerah (Pemda) bertanggung jawab untuk mencatat dan mengumpulkan data transaksi terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Data yang direkap mencakup berbagai aspek, termasuk jumlah kendaraan, pembayaran yang telah dilakukan, tunggakan, dan metode pembayaran yang digunakan.

## **Pengiriman Data Rekapitulasi ke Pusat**

Setelah data direkapitulasi di tingkat daerah, tahap berikutnya adalah pengiriman data tersebut ke pusat, dalam hal ini Depdagri. Data dikirimkan secara berkala, umumnya setiap bulan, sesuai dengan format dan standar yang telah ditentukan. Pengiriman ini dilakukan melalui sistem yang telah disiapkan untuk menerima data dari seluruh daerah di Indonesia.

## **Validasi Data oleh Pusat**

Setelah data diterima oleh pusat, proses validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan format dan standar yang telah ditentukan. Validasi ini penting untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data yang dikirim, sehingga data yang disimpan di tingkat nasional benar-benar akurat dan dapat diandalkan.

## **Penyimpanan Data ke Database**

Data yang telah divalidasi kemudian disimpan dalam database yang terpusat. Database ini berfungsi sebagai penyimpanan utama untuk semua data PKB yang dikumpulkan dari seluruh daerah. Penyimpanan yang terstruktur dan terorganisir memungkinkan pengambilan data yang cepat dan efisien untuk berbagai keperluan.

## **Penampilan Data**

Tahap terakhir dalam proses pengumpulan data adalah pengambilan data oleh software dashboard. Software ini melakukan query ke database untuk mengambil data yang diperlukan, kemudian menampilkannya dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, dan laporan visual lainnya. Dengan demikian, Depdagri dapat mengakses

dan menganalisis data PKB dari seluruh daerah secara efektif, membantu dalam pengambilan keputusan dan monitoring performa daerah.

## **Informasi yang Diperlukan oleh Pemerintah Pusat**

Untuk menjalankan fungsinya dengan optimal, pemerintah pusat memerlukan akses ke berbagai data yang relevan dan terperinci mengenai perpajakan kendaraan bermotor dari setiap daerah. Informasi ini penting untuk memantau kepatuhan pembayaran pajak, menganalisis tren perpajakan, serta mengidentifikasi potensi risiko dalam pengelolaan pendapatan daerah. Berikut adalah poin-poin utama data yang diminta:

### **Data Jumlah Kendaraan Bermotor (sesuai data Pemda)**

Informasi ini memberikan gambaran umum tentang jumlah total kendaraan bermotor yang terdaftar di setiap daerah, yang menjadi dasar untuk perhitungan potensi pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

### **Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tidak Membayar Pajak selama 5 dan 7 Tahun**

Data ini penting untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang dan membantu dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif.

### **Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Tahun**

#### **Berjalan dan Data Kendaraan Bermotor Baru**

Memantau pembayaran pajak dan pendaftaran kendaraan baru membantu dalam menilai performa penerimaan pajak di tahun berjalan serta pertumbuhan sektor otomotif di setiap daerah.

### **Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tidak Membayar Pajak selama 5, 7, dan 1 Tahun (dalam Rupiah)**

Mengetahui jumlah tunggakan pajak dalam bentuk nilai nominal membantu pemerintah pusat memahami besarnya potensi pendapatan yang belum terealisasi dan merancang strategi pemulihan tunggakan yang lebih efektif.

## **Data Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak secara Online dan Offline, serta Jumlah Pembayaran PKB secara Online dan Offline (dalam Rupiah)**

Data ini memberikan wawasan tentang preferensi dan tren pembayaran di kalangan wajib pajak, yang bisa menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan efisien.

## **Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar dan Tidak Membayar Pajak 1, 2, dan 3 Tahun Sebelumnya (sesuai tipe, dalam Rupiah)**

Informasi ini penting untuk analisis retrospektif yang membantu mengidentifikasi pola pembayaran dan potensi kendala dalam kepatuhan pembayaran pajak di masa lalu, serta untuk menyusun strategi peningkatan di masa mendatang.

Semua data ini akan diproses oleh software dashboard untuk divisualisasikan dalam bentuk bagan dan tabel yang mudah dipahami, mendukung pengambilan keputusan dan pemantauan yang lebih efektif di tingkat pemerintah pusat. Informasi yang disajikan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu memastikan integritas data yang dikumpulkan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia.

## **Format Data**

Pengelolaan data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tingkat nasional membutuhkan keseragaman dalam format data yang digunakan oleh setiap daerah. Perbedaan format data yang saat ini ada seringkali menyulitkan konsolidasi dan analisis data secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah format data standar yang dapat diadopsi secara nasional untuk memastikan bahwa data dari berbagai daerah dapat disatukan dengan efisien dan akurat. Bab ini akan membahas format data rekapitulasi bulanan yang dirancang khusus untuk Aplikasi Dashboard PKB, yang memungkinkan visualisasi dan analisis data yang konsisten dan mudah diinterpretasikan.

## Contoh Data

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
	provinsi	kabupaten	bulan	tahun	jenskendaraan	jumlahkendaraan	kendaraanbayar	jumlahonline	nilaionline	jumlahoffline	nilaioffline	nilaikendaraan	tidakbayar1tahun	jumlahkendaraan	tidakbayar5tahun	nilaikendaraan	tidakbayar7tahun
1	Provinsi Aceh	Kabupaten	7	2023 A		1648	1335	644	6334864	548	7829378	4559498		353	8846506	409	8917229
2	Provinsi Aceh	Kabupaten	7	2023 B		2563	2450	693	5919904	541	6657422	4106737		433	4110053	197	7649243
3	Provinsi Aceh	Kabupaten	7	2023 C		2243	2006	707	2691651	550	2963693	3620101		519	9390248	59	7539564
4																	
5	Provinsi Aceh	Kabupaten	8	2023 A		2097	792	497	4373480	431	9305749	4370280		120	5557285	191	2902371
6	Provinsi Aceh	Kabupaten	8	2023 B		2851	2596	711	2627914	715	2136798	4580114		886	2818416	381	1324197
7	Provinsi Aceh	Kabupaten	8	2023 C		2454	1806	700	5773530	695	5633057	2825405		328	4214695	442	8671905
8																	
9	Provinsi Aceh	Kabupaten	9	2023 A		1724	971	851	7164146	605	9135780	4232053		565	8762005	160	2263481
10	Provinsi Aceh	Kabupaten	9	2023 B		3341	620	784	9689856	614	2727920	2299737		343	8563509	306	8879367
11	Provinsi Aceh	Kabupaten	9	2023 C		2886	2770	555	6939588	497	3297240	2717342		795	4374285	307	8205100

Gambar di atas menunjukkan contoh data yang sesuai dengan format yang ditentukan. Baris ke-5 dan ke-9 sengaja dikosongkan untuk memudahkan pemahaman, namun dalam data yang sesungguhnya, tidak boleh ada baris yang kosong. Data numerik juga tidak boleh ada simbol. Sebagai contoh, jika kita ingin memahami data pada baris ke-3 dari gambar tersebut, berikut adalah data yang dimaksud dan cara membacanya:

Kolom	Nilai
Provinsi	Provinsi Aceh
Kabupaten	Kabupaten Aceh Utara
Bulan	7
Tahun	2023
Jenis Kendaraan	B
Jumlah Kendaraan	2563
Jumlah Kendaraan Bayar	2450
Jumlah Online	693
Nominal Online	5919904
Jumlah Offline	541
Nominal Offline	6657422
Nominal Kendaraan Tidak Bayar 1 Tahun	4362614
Jumlah Kendaraan Tidak Bayar 5 Tahun	433
Nominal Kendaraan Tidak Bayar 5 Tahun	4110053
Jumlah Kendaraan Tidak Bayar 7 Tahun	197
Nominal Kendaraan Tidak Bayar 7 Tahun	7649243

Pada bulan Juli tahun 2023 di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh ada 2.563 kendaraan berjenis mobil penumpang. Dari 2.563 mobil penumpang tersebut, 2.450

membayar pajak tahun berjalan. 693 mobil penumpang membayar secara online dan nilai pajak yang dikumpulkan dari pembayaran online sebesar Rp 5.919.904,00. 541 mobil penumpang membayar secara offline dan nilai pajak yang telah dikumpulkan dari pembayaran offline sebesar Rp 6.657.422,00.

Nilai pajak yang belum terkumpul dari mobil penumpang yang tidak membayar pajak selama 1 tahun sebesar Rp 4.362.614,00. 433 mobil penumpang menunggak pembayaran pajak selama 5 tahun berturut-turut dan Nilai pajak yang belum terkumpul dari mobil penumpang yang tidak membayar pajak selama 5 tahun berturut-turut sebesar Rp 4.110.053,00. 197 mobil penumpang menunggak pembayaran pajak selama 7 tahun berturut-turut dan Nilai pajak yang belum terkumpul dari mobil penumpang yang tidak membayar pajak selama 7 tahun sebesar Rp 7.649.243,00.

## **Penjelasan Kolom-Kolom Data**

### **Provinsi**

Nama provinsi secara lengkap.

### **Kabupaten/Kota**

Nama kabupaten/kota secara lengkap.



**Bulan**

Bulan ditampilkan dalam bentuk angka. Sebagai contoh, bulan Agustus adalah 8.

Bulan	Nilai
Januari	1
Februari	2
Maret	3
April	4
Mei	5
Juni	6
Juli	7
Agustus	8
September	9
Oktober	10
November	11
Desember	12

**Tahun**

Tahun dalam bentuk angka.

**Jenis Kendaraan**

Kode jenis kendaraan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Kode
Sepeda Motor	A
Mobil Penumpang	B
Truk	C
Kendaraan Roda Tiga	D
Kendaraan Elektrik	E
Kendaraan Diatas Air	F

## **Jumlah Kendaraan**

Jumlah kendaraan tahun berjalan dalam bentuk angka.

## **Jumlah Kendaraan Bayar**

Jumlah kendaraan yang membayar pajak tahun berjalan dalam bentuk angka.

## **Jumlah Online**

Jumlah kendaraan yang membayar pajak secara online dalam bentuk angka. Pembayaran online adalah pembayaran yang dilakukan secara nirkabel melalui pihak-pihak seperti Signal dan Tokopedia.

## **Nominal Online**

Nominal (Rp) pembayaran pajak yang dikumpulkan dari kendaraan yang membayar pajak secara online dalam bentuk angka. Pembayaran online adalah pembayaran yang dilakukan secara nirkabel melalui pihak-pihak seperti Signal dan Tokopedia.

## **Jumlah Offline**

Jumlah kendaraan yang membayar pajak secara offline dalam bentuk angka. Pembayaran offline adalah pembayaran yang dilakukan secara fisik dimana pembayar pajak mendatangi kantor samsat.

## **Nilai Offline**

Nominal (Rp) pembayaran pajak yang dikumpulkan dari kendaraan yang membayar pajak secara offline dalam bentuk angka. Pembayaran offline adalah pembayaran yang dilakukan secara fisik dimana pembayar pajak mendatangi kantor samsat.

## **Nominal Kendaraan Tidak Bayar 1 Tahun**

Nominal (Rp) pajak yang tidak terkumpul dari kendaraan yang tidak membayar pajak tahun berjalan dalam bentuk angka.

## **Jumlah Kendaraan Tidak Bayar 5 Tahun**

Jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak selama 5 tahun berturut-turut dalam bentuk angka.

### **Nominal Kendaraan Tidak Bayar 5 Tahun**

Nominal (Rp) pajak yang tidak terkumpul dari kendaraan yang tidak membayar pajak selama 5 tahun berturut-turut dalam bentuk angka.

### **Jumlah Kendaraan Tidak Bayar 7 Tahun**

Jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak selama 7 tahun berturut-turut dalam bentuk angka.

### **Nominal Kendaraan Tidak Bayar 7 Tahun**

Nominal (Rp) pajak yang tidak terkumpul dari kendaraan yang tidak membayar pajak selama 7 tahun berturut-turut dalam bentuk angka.

## Fitur Software

Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat, software dashboard ini telah dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan dan analisis data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berikut adalah fitur-fitur utama yang disediakan:

### Visualisasi

Software dashboard menawarkan fitur visualisasi yang menampilkan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk bagan dan grafik. Sebagai contoh, informasi mengenai nominal kendaraan bermotor yang membayar pajak dari tahun 2021 hingga 2023 dapat disajikan dengan jelas dan dikategorikan berdasarkan jenis kendaraan. Visualisasi ini mempermudah pengguna dalam menganalisis data secara cepat dan efektif.



## Selisih

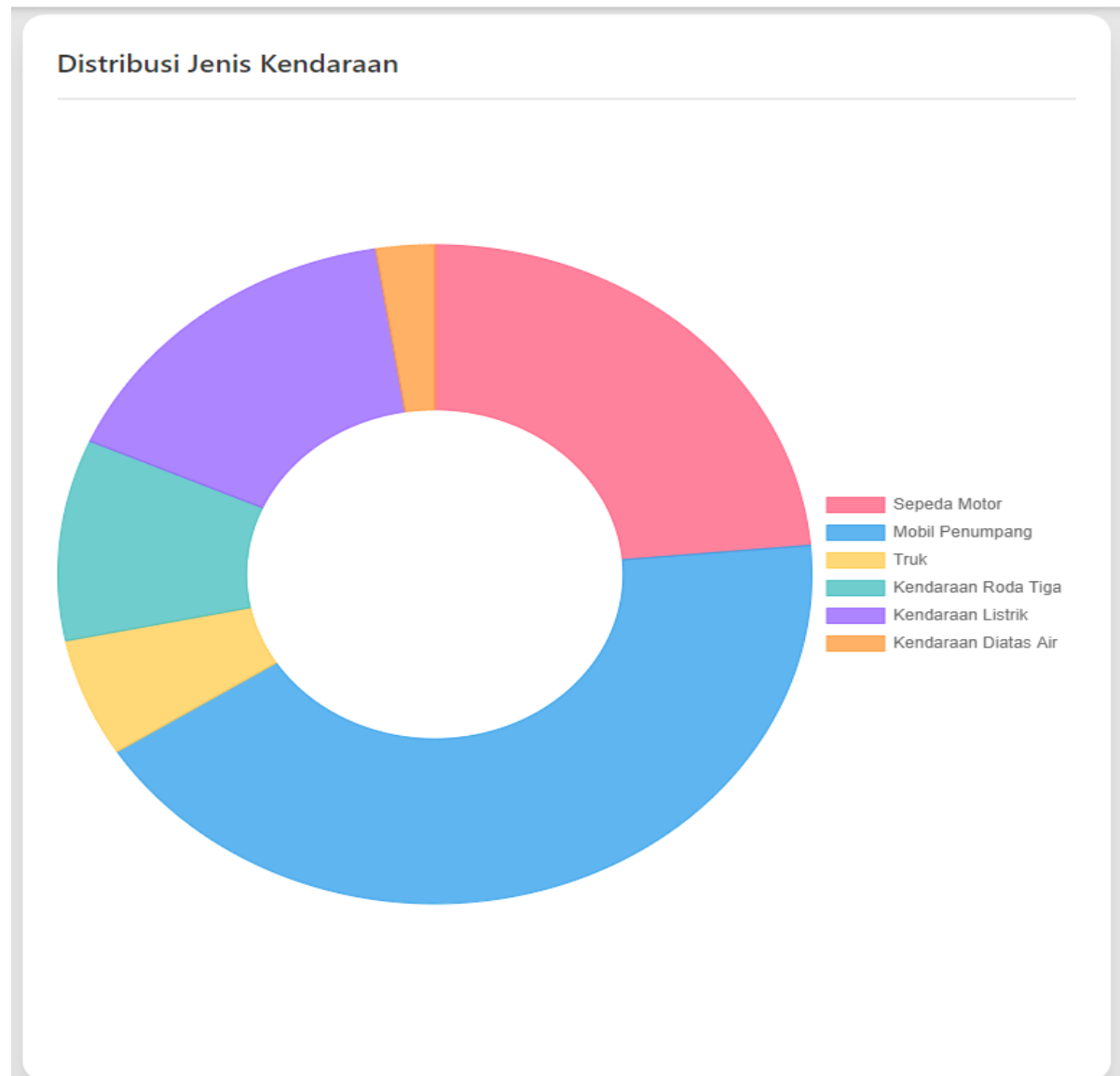
Fitur ini memungkinkan software untuk secara otomatis menghitung selisih antara realisasi dan target pajak. Misalnya, saat menampilkan data pembayaran PKB, software akan menghitung dan menampilkan perbedaan antara realisasi dan target secara otomatis, membantu pengguna memahami capaian yang telah dicapai.

### Selisih Realisasi dan Target Pajak

Tipe	Tahun 1	% Tahun 1	Tahun 2	% Tahun 2
Sepeda Motor	Rp 20.371.889.767,00	-2718.38%	Rp 19.207.056.328,00	-2066
Mobil Penumpang	Rp 18.426.152.500,00	17951.64%	Rp 16.409.504.578,00	1297.
Truk	Rp 20.028.944.652,00	-3833.02%	Rp 20.527.467.994,00	-1013
Kendaraan Roda Tiga	Rp 18.260.502.692,00	-5101.40%	Rp 17.915.588.123,00	6365.
Kendaraan Elektrik	Rp 20.441.116.170,00	-984.57%	Rp 21.224.878.259,00	-1002
Kendaraan Diatas Air	Rp 17.222.647.195,00	4055.21%	Rp 16.989.156.687,00	5695.

## Distribusi

Software juga menyediakan fitur untuk menampilkan distribusi kendaraan berdasarkan jenis. Fitur ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana populasi kendaraan tersebar di berbagai kategori, yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.



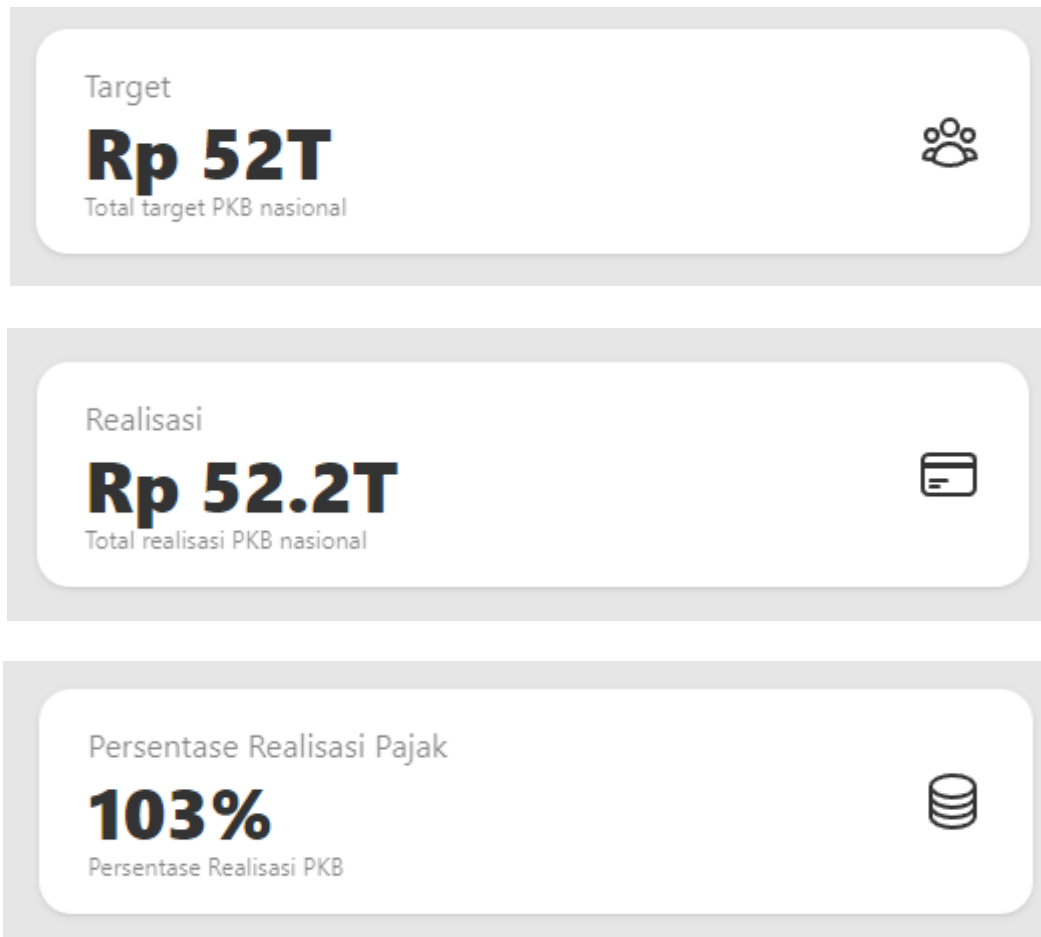
# Detail

Selain visualisasi, software dashboard juga mampu menampilkan data dalam bentuk angka mentah. Dengan akses ke data orisinil, pengguna dapat melakukan analisis lebih lanjut atau memproses data sesuai kebutuhan mereka.

Detail Data				
	Tipe Kendaraan	1 Tahun	5 Tahun	7 Tahun
1	Kendaraan Elektrik	Rp -1.884.714.948.00	Rp 15.394.389.00	Rp 13.719.263.00
2	Kendaraan Diatas Air	Rp 435.441.807.00	Rp 11.084.143.00	Rp 14.275.129.00
3	Kendaraan Roda Tiga	Rp -351.069.121.00	Rp 5.098.650.00	Rp 11.933.804.00
4	Sepeda Motor	Rp -722.821.721.00	Rp 3.297.096.00	Rp 6.372.858.00
5	Truk	Rp -509.250.926.00	Rp 6.432.857.00	Rp 5.123.544.00
6	Mobil Penumpang	Rp 103.218.281.00	Rp 14.141.043.00	Rp 10.088.904.00

## Ringkasan

Pada menu utama, software selalu menampilkan ringkasan pengumpulan PKB nasional. Ringkasan ini memberikan pandangan sekilas tentang kemajuan pengumpulan PKB, termasuk persentase pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan.





# Data Provinsi

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat nilai target serta realisasi PKB di setiap provinsi.

Data Provinsi					
NO.	Daerah	Target PKB	Realisasi PKB	Persentase Realisasi PKB	Status
I	Prov. Aceh	Rp551.425.856.554,00	Rp540.799.238.889,00	98,07%	Data Sudah Ada
II	Prov. Sumatera Utara	Rp410.000.000.004,00	Rp359.251.201.934,00	87,62%	Data Sudah Ada
III	Prov. Sumatera Barat	Rp906.376.154.000,00	Rp724.528.071.275,00	79,94%	Data Sudah Ada
IV	Prov. Riau	Rp1.374.281.303.645,00	Rp1.592.655.758.668,00	115,89%	Data Sudah Ada
V	Prov. Kepulauan Riau	Rp475.473.925.512,00	Rp535.895.634.154,00	112,71%	Data Sudah Ada
VI	Prov. Jambi	Rp615.413.085.084,00	Rp604.470.700.510,00	98,22%	Data Sudah Ada
VII	Prov. Bengkulu	Rp260.157.037.971,00	Rp255.407.209.000,00	98,17%	Data Sudah Ada
VIII	Prov. Sumatera Selatan	Rp1.144.681.213.000,00	Rp1.226.526.688.289,00	107,15%	Data Sudah Ada
IX	Prov. Bangka Belitung	Rp276.231.446.500,00	Rp291.500.615.959,00	105,53%	Data Sudah Ada
X	Prov. Lampung	Rp975.000.000.000,00	Rp1.028.551.329.873,00	105,49%	Data Sudah Ada
XI	Prov. DKI Jakarta	Rp9.100.000.000.000,00	Rp9.416.563.568.950,00	103,48%	Data Sudah Ada
XII	Prov. Jawa Barat	Rp9.006.038.416.156,00	Rp9.201.226.492.084,00	102,17%	Data Sudah Ada

Pengguna juga dapat mengakses rincian lebih lanjut untuk setiap kabupaten/kota, memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap performa daerah.

Data Kabupaten Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta							
NO.	Kabupaten/Kota	Target PKB	Realisasi PKB	Persentase Realisasi PKB	Target BBNKB	Realisasi BBNKB	Persentase Realisasi BBNKB
1	Kabupaten Bantul	Rp 56.375.031,00	Rp 94.978.051,00	168.48%	Rp 66.152.071,00	Rp 95.913.731,00	144.99%
2	Kabupaten Gunungkidul	Rp 67.836.582,00	Rp 80.919.474,00	119.29%	Rp 57.362.799,00	Rp 67.028.797,00	116.85%
3	Kabupaten Kulon Progo	Rp 97.102.606,00	Rp 59.260.938,00	61.03%	Rp 57.490.815,00	Rp 83.833.000,00	145.82%
4	Kabupaten Sleman	Rp 73.706.753,00	Rp 57.302.450,00	77.74%	Rp 61.232.108,00	Rp 51.416.524,00	83.97%
5	Kota Yogyakarta	Rp 65.932.660,00	Rp 94.766.868,00	143.73%	Rp 86.592.002,00	Rp 52.429.776,00	60.55%

## Pemekaran

Software juga menyertakan data pemekaran setiap provinsi, yang memudahkan pengguna dalam mengakses dan memahami perubahan data kendaraan terkait pemekaran wilayah.

Fitur-fitur ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola data PKB, memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia secara komprehensif dan dapat diakses dengan mudah.

Jumlah Kendaraan Bermotor Bermasalah Bapenda Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau			
NOMOR	URAIAN	MASA TUNGGAKAN	JUMLAH
1	Plat BM	0-5 Tahun	0
		6-10 Tahun	5
		>10 Tahun	73492
		<b>Total</b>	<b>73497</b>
2	Plat BP Seri X	0-5 Tahun	0
		6-10 Tahun	10
		>10 Tahun	6259
		<b>Total</b>	<b>6269</b>
3	Tipe Kosong	0-5 Tahun	0
		6-10 Tahun	1714
		>10 Tahun	18784
		<b>Total</b>	<b>20498</b>
4	Tipe Ada, Golkend Kosong	0-5 Tahun	0
		6-10 Tahun	0
		>10 Tahun	0
		<b>Total</b>	<b>0</b>

## **Kesimpulan**

Software dashboard perpajakan kendaraan bermotor yang dikembangkan untuk Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) ini merupakan langkah signifikan menuju modernisasi dan efisiensi dalam pengelolaan data pajak di Indonesia. Dengan fitur-fitur canggih yang memungkinkan visualisasi data, perhitungan selisih otomatis, analisis distribusi, serta penyajian data mentah dan rinci, software ini tidak hanya memudahkan pemerintah pusat dalam memonitor dan mengendalikan performa pajak daerah, tetapi juga memastikan integritas dan konsistensi data yang diterima.

Proses pengembangan yang dilakukan secara bertahap telah dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek dari sistem ini mampu memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Mulai dari pengumpulan data di tingkat daerah hingga pemrosesan dan penyajian informasi yang dapat diandalkan di tingkat nasional, software ini memberikan alat yang kuat bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Dengan penerapan format data standar dan fitur yang memudahkan integrasi data dari berbagai daerah, software dashboard ini tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga fondasi bagi pengambilan keputusan strategis yang lebih baik di masa depan. Fase-fase pengembangan selanjutnya akan terus memperluas cakupan dan kapabilitas software, memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan.

Keseluruhan sistem ini dirancang untuk mendukung Depdagri dalam mencapai tujuan utamanya: mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan memastikan bahwa setiap daerah berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan nasional. Dengan adanya software ini, pemerintah pusat memiliki alat yang efektif untuk memantau, mengelola, dan meningkatkan kinerja pajak kendaraan bermotor secara menyeluruh, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.